

## **BAB II**

### **TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pemerintahan Daerah**

Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1:

Ayat (2):

*“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Ayat (3):

*“Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”*

### **2.1.2. Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. (Kustadi Arinta)

*Definisi Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli-* Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

### **Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu :

a. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

c. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

### **2.1.3. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Menurut Abdul Halim (2004) dalam Hafiz Tanjung (2012) sistem pencatatan *single entry* atau pencatatan tunggal ini adalah pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal 30, 31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang pertama dibentuk. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Komponen Laporan Keuangan Pokok terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah saat ini. Pelaksanaan PP ini bersifat memaksa bagi semua daerah untuk mengimplementasikannya sejak tahun 2015. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis akrual. Pada SAP baru (PP No 71 tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)

- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

#### **2.1.4. Basis Akuntansi**

##### **Basis Kas**

Basis Kas mengakui atau mencatat suatu transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayarkan. Pada Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Basis Kas ini digunakan untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Prakteknya adalah mencatat pendapatan pada saat terdapat aliran masuk kas sesuai dengan anggaran Pendapatan Negara/Daerah dan mencatat belanja pada saat mengeluarkan kas sesuai dengan anggaran Belanja Negara/Daerah.

##### **Basis Kas Menuju Akrual**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan:

*“SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.”*

Basis ini digunakan oleh Pemerintah untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas dan Neraca Berbasis Akrual.

### **Basis Akruwal**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan:

*“SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.”*

Dalam PSAP 01: Basis akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **2.1.5. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan Pasal 1:

Ayat (1):

*“Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.”*

Ayat (2):

*“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.”*

Ayat (4):

*“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”*

Ayat (5):

*“Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.”*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat

(3) tentang standar akuntansi pemerintahan:

*“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8):

*“SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.”*

Komponen-komponen Laporan Keuangan Pokok yang harus disajikan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas

pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran:

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)			
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)		
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Realisasi 20X0
59	<b>TRANSFER</b>			
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>			
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
65	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 - 64)</b>			
66				
67	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
68				
69	<b>PEMBIAYAAN</b>			
70				
71	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
72	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx
84	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
85				
86	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
88	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx
98	<b>Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
99	<b>PEMBIAYAAN NETO (84 - 98)</b>			
100	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxx</b>

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL):

**PEMERINTAH DAERAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Contoh format Neraca:

<b>NERACA</b>			
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	XXXX	XXXX
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
5	Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX	XXXX
6	Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX
7	Piutang Pajak	XXXX	XXXX
8	Piutang Retribusi	XXXX	XXXX
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXXX	XXXX
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXXX	XXXX
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	XXXX	XXXX
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	XXXX
16	Piutang Lainnya	XXXX	XXXX
17	Persediaan	XXXX	XXXX
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	XXXX	XXXX
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXXX	XXXX
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXXX	XXXX
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	XXXX	XXXX
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXXX	XXXX
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	XXXX	XXXX
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)	XXXX	XXXX
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
30	Investasi Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)	XXXX	XXXX
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)	XXXX	XXXX
33	<b>ASET TETAP</b>		
34	Tanah	XXXX	XXXX
35	Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
36	Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXXX	XXXX
38	Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXXX	XXXX
40	Akumulasi Penyusutan	(XXXX)	(XXXX)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	XXXX	XXXX
42	<b>DANA CADANGAN</b>		
43	Dana Cadangan	XXXX	XXXX
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	XXXX	XXXX

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
45	<b>ASET LAINNYA</b>		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
47	Tuntutan Perbendaharaan	XXXX	XXXX
48	Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	XXXX
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
50	Aset Tak Berwujud	XXXX	XXXX
51	Aset Lain-Lain	XXXX	XXXX
52	Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)	XXXX	XXXX
53	<b>JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)</b>	XXXX	XXXX
54			
55	<b>KEWAJIBAN</b>		
56	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXXX	XXXX
58	Utang Bunga	XXXX	XXXX
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXXX	XXXX
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	XXXX	XXXX
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	XXXX	XXXX
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	XXXX	XXXX
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXX	XXXX
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)	XXXX	XXXX
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXXX	XXXX
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	XXXX	XXXX
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	XXXX	XXXX
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	XXXX	XXXX
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)	XXXX	XXXX
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)</b>	XXXX	XXXX
76	<b>EKUITAS DANA</b>		
77	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	XXXX	XXXX
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	XXXX	XXXX
80	Cadangan Piutang	XXXX	XXXX
81	Cadangan Persediaan	XXXX	XXXX
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(XXXX)	(XXXX)
83	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)	XXXX	XXXX
84	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	XXXX	XXXX
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	XXXX	XXXX
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXX	XXXX
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(XXXX)	(XXXX)
89	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)	XXXX	XXXX
90	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	XXXX	XXXX
92	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)	XXXX	XXXX
93	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92)</b>	XXXX	XXXX
94	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93)</b>	XXXX	XXXX

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## Contoh format Laporan Operasional:

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenalkan/ Penurunan	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )	xxx	xxx	xxx	xxx
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (28 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 32)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
34					
35	<b>BEBAN</b>				
36	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48	<b>JUMLAH BEBAN (38 s/d 47)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
51					
52	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
58	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
59	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
60					
61	<b>POS LUAR BIASA</b>				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64	<b>POS LUAR BIASA ( 62-63)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
65	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64)</b>	xxx	xxx	xxx	xxx

## 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Contoh format Laporan Arus Kas:

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dan Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
 Metode Langsung

No.	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pembertan Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pembertan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pembertan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenalkan/Penurunan Kas (51 - 49 - 77 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 - 89 - 90)	XXX	XXX

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas:

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi Umum Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan:

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1	Pendapatan ó LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Transfer
	5.1.4	Pembiayaan
	5.1.5	Pendapatan ó LO
	5.1.6	Beban
	5.1.7	Aset
	5.1.8	Kewajiban
	5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah	
Bab VII	Informasi lainnya	
Bab VIII	Penutup	

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecuali:

- a) Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah);
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

#### **2.1.6. Komitmen**

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain (organisasi) yang tercermin dalam tindakan kita. Menurut Porter et.al. dalam Miner, (1992:124), komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan bawahan satuan kerja termasuk pimpinan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Komitmen pimpinan dalam suatu instansi pemerintah menjadi kunci menciptakan layanan publik yang berkualitas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

### **2.1.7. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

### **2.1.8. Infrastruktur**

Infrastruktur sama saja dengan sarana prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur adalah pendukung utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diukur dengan aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akrual (Grigg, 2000).

### **2.1.9. Sistem Informasi**

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam

organisasi. Menurut Mukhtar (2002: 4), sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah:

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Ririz Setiawati Kusuma (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)	Kajian Analisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual, metode yang digunakan	Lokasi Penelitian	Secara Umum Kabupaten Jember cukup siap untuk melaksanakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2.	Andi Faradillah (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	Kajian Analisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual	Objek yang diteliti, metode yang digunakan	Pemerintah Kota Makassar masih belum melaksanakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
3.	Sofia Dora (2014)	Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada BPBD Kota Medan)	Kajian Analisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual, metode yang digunakan	Lokasi Penelitian	Pemerintah Kota Medan belum menerapkan PP No 71 tahun 2010 karena masih menunggu pedoman umum dari Kemendagri.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Seperti pada penelitian Ririz Setiawati Kusuma (2013) yang meneliti Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dengan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember. Persamaannya terletak pada kajian analisis terhadap kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian.